

Peningkatan Mutu dan Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar

Nur Atikah¹, Yeni Resisca²

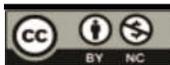
^{1 2} Universitas Negeri Padang

* e-mail: Nurmuratikah7@gmail.com, yeniresisca@unp.ac.id

Abstract

This paper aimed at determining the the quality of education in primary schools. This paper contributed to principal on improving supervision in order to have very good primary school's performance. Since the school wishes to have good performance they should have good principal's supervision, committee's participation, and educators, parents of students, and the community in the school environment. Efforts to improve the quality of education that can be applied, such as; provide opportunities for teachers to improve their competencies, provide books in the library, provide training in leadership and management of school principals, renewal of infrastructure to support student comfort while in school, especially in the classroom when studying, increase community participation and the role of people parents to guide them when they are at home and in the end, namely the policies that the school makes according to the needs of the school.

Keywords: quality of education; primary schools



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

PENDAHULUAN

Anak-anak dan orang dewasa sangat membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di sekolah pada umumnya. Pendidikan formal berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan formal merupakan pendidikan yang mempunyai jenjang yang jelas seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Lulusan dari pendidikan formal ini diakui pemerintah baik secara nasional maupun internasional.

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang didapat pada jalur lingkungan seperti di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan-pelatihan untuk menambah hard skill dan soft skill maupun untuk mencetak kemampuan dan keterampilan baru. Terkait dengan ujian di pendidikan formal adalah dengan Ujian Nasional (UN) sedangkan pada

pendidikan non formal ini biasanya dikenal dengan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Dimanapun pendidikan itu didapatkan hakikatnya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak memiliki keterampilan menjadi pribadi yang lebih terampil.

Pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan sangat menentukan mutu pendidikan suatu sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab dan bekerja keras dapat menjadikan pendidikan di sekolah dasar menjadi bermutu.

Pendidikan di Indonesia harus mampu bersaing dengan pendidikan di luar negeri. Salah satu caranya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan manajemen di setiap sekolah. Mutu pendidikan sekolah yang bagus dapat mencetak generasi yang bagus pula. Pendidikan yang bagus yang dimiliki generasi muda bisa mereka terapkan untuk membangun Indonesia supaya menjadi lebih dan tidak ketinggalan zaman. Maka dari itu untuk

menjadikan bangsa Indonesia menjadi maju dan berjaya maka harus meningkatkan mutu pendidikan masing-masing individunya. Jika mutu dan pengelolaan pendidikan di Indonesia sudah bagus maka pemerintahan bisa dilaksanakan dengan baik pula serta perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik. Hal ini juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat erat kaitannya dengan kata administrasi sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan yang baik dalam pengelolaan pendidikan akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan akan sangat efisien dan efektif jika dilakukan pengembangan serta pembinaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kemampuan professional yang dilakukan akan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Kata administrasi sekolah sering kali disandingkan dengan istilah pengelolaan dan manajemen. Administrasi adalah hubungan antar komponen yang menjalin proses kerja sama untuk memperbaiki sistem dan mencapai tujuan pendidikan (Silalayi et al., 2018). Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menetapkan sistem kerja, menyelenggarakan, menjaga kerjasama antar personil serta melakukan pengawasan di suatu lembaga (Kedir & Geleta, 2017). Dapat disimpulkan bahwa administrasi hampir sama dengan manajemen. Administrasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan kerjasama kelompok supaya bisa mencapai tujuan. Kegiatan tersebut seperti mengendalikan sarana prasarana, material dan spiritual anggota kelompoknya dengan salah satu pemimpin yang bisa mengatur semuanya dengan efektif dan efisien.

Sedangkan manajemen adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil sesuatu. Manajemen yaitu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mengelola sesuatu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lenenburg, 2010). Mengelola yang dimaksud yaitu meliputi planning, organizing, leading, and controlling.

Manajemen pendidikan merupakan dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan faktor

penunjang dalam pembangunan nasional (Usman, 2014). Lembaga pendidikan sangat membutuhkan manajemen yang baik karena tujuan pendidikan akan tercapai jika manajemen suatu lembaga baik (Rakhmawati, 2019). Manajemen pendidikan di sekolah yang baik akan mewujudkan tujuan pendidikan secara efisien, efektif dan optimal (Mansur, 2013). Lebih mendetail dari itu, kepala sekolah harus mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan optimal (Hadiyanto, 2019).

Indonesia masih menghadapi rendahnya mutu pendidikan meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di SD salah satunya karena warga sekolah kurang bertanggung jawab menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Hal ini karena masyarakat tidak dilibatkan ketika kepala sekolah menetapkan kebijakan yang ada di sekolah. Orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pendidikan di SD. Dukungan masyarakat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah karena salah satu komponen peningkatan mutu sekolah yaitu manajemen pemberdayaan masyarakat.

Ketika menyusun program perencanaan guru, tenaga pendidik lain bahkan masyarakat kurang berpartisipasi. Selama proses pembelajaran guru belum optimal menggunakan teknologi dan alat peraga ketika mengajar. Guru belum melakukan evaluasi sumatif dan formatif serta guru juga belum melakukan remedial kepada siswa yang belum lulus KKM. Siswa yang memiliki kemampuan lebih atau telah lulus KKM tidak diberikan pengayaan atau kegiatan tambahan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Gaya komunikasi yang interaktif, dua arah, efektif dan terbuka kepala sekolah terhadap tenaga pendidik disekolah membuat tenaga pendidik merasa senang. Karena tenaga pendidik baik guru maupun karyawan yang merasa senang membuat suasana di sekolah menjadi harmonis dan kondusif. Kepala sekolah harus berbicara dengan sopan baik kepada yang tua maupun yang muda. Sikap ini akan membuat para guru bertanggung jawab dan semangat ketika menjalankan tugas karena

kepala sekolah selalu memotivasi mereka setiap saat. Sesekali kepala sekolah boleh bersikap otoriter, jika ada guru atau karyawan di sekolah bermalas-malasan dan lalai saat diberi tanggung jawab. Hal ini boleh tidak disukai oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus mengingatkan karyawannya untuk selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Keadaan yang timbul akibat suatu hubungan yang saling mempengaruhi dapat menciptakan iklim kerjasama di sekolah yang kondusif (Hadiyanto, 2016). Kunci kerjasama adalah saling ketergantungan positif, akuntabilitas individu, interaksi suportif, keterampilan sosial dan proses kelompok (Wilia & Gistituati, 2018).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan standar Nasional pendidikan. Begitu pentingnya sarana prasarana pendidikan maka setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba memenuhi standar sarana prasarana pendidikan demi meningkatkan proses pembelajaran. Walaupun keberadaan sarana prasarana dalam proses pembelajaran sangat penting, namun kenyataannya dilapangan masih ditemukan beberapa sekolah yang memiliki sarana prasarana yang kurang memadai, sehingga sangat wajar jika sekolah tidak memiliki mutu lulusan yang unggul dibandingkan sekolah lain yang memiliki sarana prasarana yang lebih baik.

Di dalam kegiatan belajar tidak akan sempurna apabila tidak didukung oleh media yang relevan yang baik. Bagaimana seorang anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik bila peralatan tidak ada. Sarana-sarana seperti ini harus dimiliki oleh setiap sekolah, demikian juga sumber-sumber belajar, buku-buku perpustakaan harus lengkap sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Selain itu faktor lain yang menentukan keberhasilan pendidikan di suatu sekolah yaitu fasilitas atau sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Agar tujuan yang dirumuskan bisa tercapai sehingga meningkatkan kreativitas siswa maka perlu adanya pendayagunaan dan pengelolaan sarana prasarana yang baik (Lian & Kristiawan,

2018). Kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di sekolah sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Pengolaan sarana prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan sumber (resource adequacy) dan kenyamanan fisik (physical comfortable) yang didapatkan (actual) para peserta didik lebih rendah dari pada yang mereka inginkan (preferred) (Gistituati et al., 2020) (Sutjipto & Hadiyanto, 2002).

Kemampuan manajemen kepala sekolah sangat berpengaruh pada sarana prasarana di sekolah sebagai contoh sarana prasarana di salah satu SD di provinsi Bengkulu belum optimal. Sudah 3 tahun dipercaya memiliki wewenang di SD A namun keadaan ruang kelas yang kurang baik seperti plafon bocor, pojok baca dan lemari belum disediakan. Meja dan kursi bisa bergerak sendiri meskipun tidak ditempati. Sedangkan SD tetangga baru 1 tahun kepala sekolah menjabat, mereka sudah mengganti meja untuk satu siswa satu meja dan kursi pun sudah menggunakan kursi kayu yang baru. Ruang perpustakaan dan buku hanya dijadikan pelengkap syarat untuk akreditasi. Ruang UKS, mushola, ruang pramuka masih belum maksimal dalam pengelolaannya. Dahulu ada ruang komputer namun sekarang kurang optimal pengelolaan dan perawatannya sehingga 10 komputer yang ada di ruangan itu rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ada ruang olahraga yang disediakan namun hanya ada papan tenis meja namun tidak pernah digunakan akhirnya meja tenis rusak, yang masih berfungsi hanya bola kaki dan bola volly. Tempat buang air juga hanya untuk kepala sekolah yang bagus, untuk guru cukup bagus namun untuk siswa tidak layak sama sekali. Sehingga para siswa sering sekali mampir ke toilet guru. Karena toilet adalah kebutuhan primer di sekolah seharusnya dibuat dan difasilitasi layak guna dan tidak bau.

Permasalahan di atas tidak hanya di satu sekolah, dan bisa jadi belum adanya tenaga profesional untuk menangani manajemen bidang sarana prasarana. Para pelaksana

program terkhusus kepala sekolah harus segera berkoordinasi dengan para tenaga profesional untuk melakukan manajemen sarana prasarana yang lebih baik supaya bisa meningkatkan proses pembelajaran siswa yang nyaman di sekolah.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Hadiyanto, 2019). MBS adalah konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Implementasi dari MBS memberikan kesempatan luas bagi stakeholders untuk turut berpartisipasi aktif menentukan arah sekolah (Hadiyanto et al., 2019).

PEMBAHASAN

Sudah banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan, diantaranya memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki, sekolah juga sudah menyediakan buku di perpustakaan sebagai sumber pengetahuan siswa agar ketika mereka memiliki waktu luang bisa membaca di perpustakaan. Kepala sekolah juga sudah diberikan pelatihan untuk menjadi pemimpin yang baik serta sudah diajarkan bagaimana cara memajemen sekolah yang sedang ia pimpin. Pemerintah juga telah melakukan pembaharuan dengan sarana prasarana untuk menunjang kenyamanan siswa selama di sekolah terutama di dalam kelas ketika belajar.

Kenyataannya mutu dan manajemen pendidikan di SD tersebut masih belum menunjukkan tingkat perubahan secara konsisten. Guru sering kali kewalahan, bagaimana yang harus mereka lakukan supaya mutu dan manajemen pendidikan di sekolah meningkat secara konsisten.

Adapun faktor yang mempengaruhi mutu dan manajemen pendidikan tidak meningkat secara konsisten yaitu; *Pertama*, ketidak sesuaian peraturan, keputusan birokrasi, dan juklak yang dikeluarkan dengan kondisi yang ada di sekolah. Maka sekolah itu tidak mandiri, tidak inisiatif serta kehilangan motivasi untuk memajukan sekolahnya dan

mengembangkan mutu serta manajemen pendidikan.

Kedua, sekolah lebih menekankan untuk menyediakan input pendidikan seperti, fasilitas pendidikan, kurikulum, guru, buku dan alat peraga. Mereka berasumsi bahwa jika input pendidikan terpenuhi maka peningkatan mutu pendidikan bisa terjadi dengan sendirinya. Padahal hal ini tidak benar, karena kenapa tidak aka nada output yang bagus jika input yang disediakan tidak dilakukan dengan manajemen yang baik. Jadi memang penting diadakan komponen standar yang menunjang pendidikan namun harus diimbangi dengan proses yang baik.

Ketiga, siswa yang dituntut untuk menguasai lebih dari 2 mata pelajaran membuat pemikiran mereka tidak fokus untuk mengeksplorasi mata pelajaran secara mendalam. Siswa hanya mengenal berbagai macam mata pelajaran namun mereka tidak bisa menjelaskan secara rinci dan mereka tidak bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

Keempat, minat belajar yang kurang membuat mutu pendidikan di SD menjadi rendah. Siswa yang termotivasi untuk belajar akan membantu siswa dalam mengkontruksikan materi yang mereka peroleh menjadi informasi yang sinkron. Motivasi siswa tidak hanya tumbuh dari dalam diri siswa melainkan juga harus diberikan oleh keluarga, masyarakat bahkan fasilitas penunjang proses pembelajaran.

Kelima, sekolah tidak melibatkan orang tua maupun masyarakat ketika mengambil keputusan dan menyelenggarakan manajemen di sekolah. Sehingga menimbulkan kontroversi bahwa dimasa sekarang apakah benar penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya ditanggung pemerintah? Apakah tidak membutuhkan hubungan yang bersahabat serta demokratis dari orang tua siswa serta masyarakat di lingkungan sekolah?

Faktor penyebab mutu dan manajemen pendidikan yang tidak bisa meningkat secara konsisten bisa diatasi dengan melakukan perbaikan atau evaluasi seperti; *Pertama*, penyelenggaraan pendidikan tidak diatur sepenuhnya secara birokrasi. Dengan begitu, kepala sekolah dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh sekolah bisa menyesuaikan

dengan apa yang dibutuhkan tidak sepenuhnya tergantung pada aturan, juklak, keputusan birokrasi serta intruksi. Jika sekolah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya, sekolah ini akan termotivasi, inisiatif bahkan akan mandiri untuk memajukan sekolahnya.

Kedua, para pendidik dan tenaga kependidikan diberikan seminar, pelatihan atau diikutsertakan dalam studi banding ke SD lainnya. Hal ini berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan kemampuan sesuai bidang keahliannya.

Upaya untuk meningkatkan akademis guru dengan memberikan izin para guru untuk kuliah strata satu bagi yang belum kuliah dan bagi yang lulusan jurusan lain bisa diberikan kesempatan juga supaya kuliah ulang jurusan PGSD atau pendidikan dasar karena dengan para gurunya belajar di bangku kuliah materi ke SD-an maka akan lebih mudah dan membantu para guru untuk mengelola kelas, menerapkan pendekatan apa ketika belajar serta bisa membuat alat praga dan bahan ajar tambahan jika bahan ajar dari pemerintah sulit dipahami siswa. Guru bisa mengupayakan peningkatan hasil belajar yang konsisten, tidak hanya dua tahun ini bagus, tahun depan menurun tahun depan meningkat. Guru harus bisa menstabilkan grafik peningkatan mutu pendidikan terutama pada hasil belajar atau lulusan siswa SD dari tahun ke tahun.

Selanjutnya pemerintah dan jajarannya terutama kepala sekolah harus memperhatikan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan karena dengan meningkatkan sejahtera pendidik beserta tenaga kependidikan akan termotivasi untuk mengajar. Karena kesejahteraan yang diberikan pemerintah dan kepala sekolah akan membahagiakan psikologis sehingga mereka termotivasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga, kepala sekolah harus merencanakan fasilitas pendukung proses pembelajaran, baik itu memperbaiki fasilitas yang sudah ada di sekolah maupun menyediakan fasilitas baru. Fasilitas sarana prasarana yang bagus harus di rawat dan diberdayakan dengan semestinya akan membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Keempat, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan merevisi kurikulum tingkat SD. Materi pelajaran yang terlalu banyak akan membuat siswa jenuh dalam belajar sehingga pemahaman siswa terhadap konsep materi tersebut tidak maksimal. Diharapkan dengan adanya pengurangan materi pada kurikulum, siswa bisa lebih menguasai materi yang diberikan.

Selain itu, seharusnya tenaga pendidik di sekolah dasar sudah mengetahui bakat dan minat siswa. Sehingga kemampuan dasar itu bisa diasah oleh siswa dan menjadi tumpuan supaya siswa bisa membanggakan dirinya dan bisa bergabung dengan jurusan sesuai kemampuan minat bakat yang dimilikinya. Hal ini diharapkan supaya ketika terjun ke dunia kerja maka siswa akan lebih percaya diri untuk bersaing baik bersaing di dalam negeri maupun bersaing di mancanegara.

Kelima, guru harus memotivasi siswa. Siswa harus selalu dimotivasi supaya selalu giat belajar. Cara memotivasi siswa bisa dengan menggunakan metode, pendekatan dan model pembelajaran yang berfariasi. Diharapkan siswa selalu termotivasi belajar, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh tidak ada kejenuhan sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik.

Keenam, sekolah juga harus meningkatkan peran serta masyarakat terkhusus peran orang tua siswa untuk membimbing mereka ketika di lingkungan rumah. Pihak sekolah bisa melakukan pertemuan dengan orang tua siswa secara berkala. Lingkungan keluarga maupun masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu ada cara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah seperti kebijakan yang dibuat sekolah, cara kepala sekolah memimpin, infrastruktur sekolah dan proses pembelajaran yang diadakan di sekolah.

Kebijakan yang di buat sekolah sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Kebijakan yang baru akan membentuk suasana baru yang bisa jadi tidak sesuai dengan hati nurani warga sekolah lainnya. Maka dari itu, kepala sekolah harus berkolaborasi dengan warga sekolah baik itu tenaga pendidik, komite, tata usaha, orang tua siswa bahkan masyarakat yang ada di

lingkungan sekolah ketika akan membuat suatu kebijakan. Jika semuanya sudah berkolaborasi dan saling bertanggung jawab diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut.

Ada 5 langkah ketika akan membuat suatu kebijakan. *Pertama*, agenda setting atau menetapkan apa yang menjadi urgensi masalah di SD yang sedang kepala sekolah pimpin. Lalu diformulasikan, dengan memilih alternatif apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekolah serta kepala sekolah harus membuat hipotesis jika rencana A yang digunakan ada apa keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Kerugian ini harus diminimalisir dengan menentukan alternatif penyelesaian untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan terjadi. Jika rencana A tidak berhasil maka kepala sekolah bisa mengambil langkah ke rencana B.

Setelah dilakukan formulasi kebijakan maka kepala sekolah harus melakukan adopsi kebijakan atau penyesuaian kebijakan yang akan dibuat dengan kebijakan yang sudah ada. Kebijakan yang akan dibuat harus mengevaluasi atau mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan karena kebijakan yang telah ada.

Setelah disesuaikan dengan kebijakan dahulu, maka kebijakan baru dilaksanakan di sekolah dasar dengan memobilisasi dana serta sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Suatu kebijakan harus disepakati oleh pihak terkait ketika akan mengimplementasikannya. Kebijakan yang akan diimplementasikan harus menguatkan dan menjamin berbagai arahan, peraturan, membuat dan mengeluarkan penemuan, melakukan penerimaan dan pembinaan untuk para tenaga pendidik, membentuk organisasi baru, membuat anggaran dan menciptakan bentuk analisis laporan.

Pada tahap ini, monitoringpun dilakukan, setelah itu dilakukan evaluasi apakah kebijakan yang ditetapkan sudah berjalan berjalan maksimal dan meningkatkan mutu pendidikan di SD. Jika kebijakan yang dibuat masih ada yang merugikan warga sekolah maka kepala sekolah merevisi dan membuat kebijakan baru supaya tidak ada yang dirugikan kembali lagi ke siklus awal dan begitu seterusnya.

Untuk merumuskan kebijakan seorang yang membuat keputusan harus mengetahui apa masalah yang ada di sekolah, apa saja hasil yang diharapkan yang akan datang mengenai kebijakan yang telah dibuat. Apakah pilihan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang maksimal, apa hasil kebijakan yang didapat setelah kebijakan itu dilaksanakan, terakhir kepala sekolah harus tahu bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan itu mampu memecahkan masalah atau malah menambah masalah di sekolah? Jika kebijakan itu sudah menguntungkan warga sekolah maka kebijakan itu bisa tetap dilakukan ke masa yang akan datang.

Contoh dari kebijakan sekolah dasar yang baru dibuat yaitu memberikan kebebasan kepada para guru dalam menginterasikan dan mengembangkan kurikulum dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan mengenai budaya ramah lingkungan dengan mengembangkan dan memberdayagunakan fasilitas yang telah ada di sekolah. Sekolah membuat kebijakan untuk memanfaatkan barang bekas dan mengelolah sampah supaya lingkungan menjadi bersih dan meningkatkan kreativitas warga sekolah.

Selanjutnya gaya kepemimpinan kepala sekolah akan mempengaruhi suasana di sekolah. Kepemimpinan adalah kunci kepala sekolah untuk membuat perubahan yang lebih baik. Dalam memimpin kepala sekolah harus bisa memahami seluruh warga sekolah. Kepala sekolah bisa memberikan hadiah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hadiah ini akan membahagikan psikologis mereka. Pendidik dan tenaga kependidikan akan bangga kerana diberi hadiah dan mereka yang belum mendapat hadiah akan termotivasi untuk bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap amanat tugas yang mereka emban. Jika ada warga sekolah yang melakukan kesalahan maka kepala sekolah harus mengurangi hukuman yang bersifat fisik. Hukuman fisik ini akan masuk ke memori jangka panjang mereka bahkan bisa membuat pendidik dan tenaga kependidikan lebih malas dalam bekerja.

Kepala sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan

bersahabat. Hubungan yang baik akan menciptakan suasana hati yang baik diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD. Situasi sekolah yang bagus, tanggung jawab dengan kebutuhan murid seperti selalu peduli dengan siswa dan dekorasi bangunan yang indah, bersih, menarik dan serasi merupakan faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kualitas pendidikan di SD dipengaruhi oleh penyusunan tujuan akademik yang jelas dan tepat, memiliki sikap percaya diri serta sekolah yang berhasil cenderung membuat penggunaan tugas rumah yang baik. Jika guru-guru menjadi tauladan yang baik seperti manajemen waktu dengan baik, dan menangani masalah yang sedang dihadapi murid.

Kepala sekolah memiliki sikap demokratis, terbuka dan menerima apapun karakteristik warga sekolahnya. Masyarakat yang mengetahui di SD A ada siswa yang istimewa manumbuhkan niat mereka untuk berdonasi. Kepala sekolah sangat berterima kasih kepada para donator yang telah mengulurkan tangannya untuk membantu mereka di sekolah. Dana bantuan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang istimewa sudah terkumpul dan bisa dibuat kebijakan untuk mengadakan pelajaran tambahan khususnya siswa untuk siswa istimewa. Sehingga kepala sekolah berencana membuat kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di SD yang sedang dia pimpin. Berdasarkan analisa lapangan, masyarakat sudah banyak yang menjadi donator untuk mendukung siswa yang istimewa maupun siswa reguler. Para donator memberikan beasiswa pendidikan untuk mereka yang istimewa dan memberikan bantuan untuk siswa reguler yang tidak mampu.

Pengadaan infrastruktur yang baik sangat didukung oleh masyarakat. Sarana prasarana serta sumber belajar yang baik menunjang mutu pendidikan sekolah. Sarana prasana ini diharapkan membantu siswa untuk sama-sama merasakan dan mendapatkan kesempatan yang sama ketika belajar. Sarana prasarana yang baik serta lingkungan belajar yang baik akan memberikan rasa nyaman dan

kemudahan siswa dalam belajar terutama anak istimewa.

Kepala sekolah membuat perencanaan mengenai aksesibilitas fisik, yang terdiri dari alat transportasi, komunikasi, bangunan bahkan tempat rekreasi diluar kelas atau di lingkungan sekolah. Perencanaan ini sangat bagus untuk dilakukan karena bisa memudahkan semua pihak, baik itu kepala sekolah, para guru, orang tua dan siswa.

Selain itu, komite sekolah juga memiliki peran untuk meningkatkan mutu sekolah. Komite sekolah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Perlu adanya sosialisasi mengenai kedudukan dan tugas komite sekolah supaya menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif (Kristiawan & Fitriani, 2020). Pendanaan sekolah merupakan faktor terpenting dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Bagusnya kerjasama kepala sekolah, pihak sekolah, komite sekolah dan stakeholders lainnya diharapkan bisa mengatasi masalah tentang pendanaan.

Komite sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah memberikan keterangan beberapa strategi yang dilakukannya salah satu pembentukan struktur komite sekolah dan rapat rutin komite sekolah dengan pihak sekolah tiap tiga bulan sekali atautiap akhir semester. Selain itu, strategi lainnya adalah pihak komite sekolah merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan sekolah lainnya agar jalinan komunikasi dan silaturahmi terjaga dengan pihak sekolah. Kepolisian, satpol PP dan pihak keamanan lainnya yang menjaga ketertiban dan menjaga keamanan sekolah juga sudah diajak untuk berkoordinasi.

Kendala yang masih dihadapi komite sekolah yaitu pembangunan infrastruktur sekolah. Pembangunan ini ketika dilaksanakan dipengaruhi oleh masyarakat dari dalam ataupun luar sekolah. Kendala yang dihadapi komite demi kelancaran proses pendidikan dapat diidentifikasi. Berdasarkan temuan hasil penelitian terungkap bahwa, kenyataannya strategi yang dilakukan komite sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan tidak selalu berjalan mulus.

Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain: komunikasi yang terhambat antara sekolah dan wali murid, tindak lanjut program yang tidak lancar, tidak semua orang tua murid mempunyai pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya, pengawasan yang tidak terstruktur. Selain itu, masih adanya ganjalan hubungan sekolah dengan komite sekolah berkaitan dengan adanya anggapan masyarakat tentang belum sepenuhnya sekolah melaksanakan transparansi dalam berbagai laporan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh komite sekolah: “Kurangnya komunikasi antara guru di sekolah dengan komite sekolah atau masyarakat, sehingga terciptanya komunikasi satu arah antara sekolah dan komite sekolah serta orang tua murid dan pada akhirnya sekolah tidak tahu keinginan masyarakatnya tetapi memaksakan keinginan pada komite sekolah dan orang tua murid yang pada saat itu hanya terlibat pada aspek pembiayaan saja”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi di lapangan masalah komunikasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif antara sekolah dan komite sekolah, walaupun sekolah telah melaksanakan berbagai program dalam upaya memperkuat hubungan dengan komite sekolah dan mengkomunikasikan program-program sekolah, namun karena keterbatasan dari pihak sekolah maupun karena kesibukan orang tua murid, sehingga komunikasi terkadang tidak semuanya berjalan lancar, hal ini seperti adanya undangan rapat akhir tahun ajaran, walaupun orang tua murid sudah diundang, namun tidak semua orang tua atau masyarakat yang datang. Sehingga hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara orang tua dan pihak sekolah tidak berjalan lancar.

Namun pada kenyataannya tidak semua orang tua murid dapat hadir ke sekolah. Contohnya pada acara sosialisasi program pergantian raport baru karena perubahan kurikulum baru 2013. “Berdasarkan keterangan kepala sekolah di atas, masih ada kendala berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua murid, hal ini dianggap wajar karena kesibukan orang tua. Sehingga tidak semua

orang tua siswa dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan di sekolah.

KESIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan sudah sejak zaman dulu dilakukan, seperti memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Sekolah juga sudah menyediakan buku di perpustakaan sebagai sumber pengetahuan siswa ketika mereka memiliki waktu luang bisa membaca di perpustakaan. Kepala sekolah juga sudah diberikan pelatihan untuk menjadi pemimpin dan manajer yang baik serta sudah diajarkan bagaimana cara memanajemen sekolah yang sedang ia pimpin. Pemerintah juga telah melakukan pembaharuan dengan sarana prasarana untuk menunjang kenyamanan siswa selama di sekolah terutama di dalam kelas ketika belajar.

Selain itu kepala sekolah bisa meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan di sekolah dengan melakukan beberapa hal berikut itu.

1. Penyelenggaraan pendidikan hendaknya dilaksanakan secara demokratis.
2. Para tenaga pendidik khususnya guru diberikan seminar, pelatihan atau diikuti sertakan dalam studi banding ke SD lainnya.
3. Pemerintah dan jajarannya terutama kepala sekolah harus memperhatikan kesejahteraan para pendidik khususnya guru.
4. Kepala sekolah harus merencanakan fasilitas pendukung proses pembelajaran, baik itu memperbaiki fasilitas yang sudah ada di sekolah maupun menyediakan fasilitas baru.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan merevisi kurikulum tingkat SD.
6. Guru harus memotivasi siswa. Siswa harus selalu dimotivasi supaya selalu giat belajar. Cara memotivasi siswa bisa dengan menggunakan metode, pendekatan dan model pembelajaran yang bermacam-macam.
7. Sekolah juga harus meningkatkan peran serta masyarakat terkhusus peran orang tua siswa untuk membimbing mereka ketika di lingkungan rumah. Pihak sekolah bisa

melakukan pertemuan dengan orang tua siswa secara berkala.

8. Kebijakan yang dibuat sekolah sesuai dengan kebutuhan di sekolah
9. Kepala sekolah memiliki sikap demokratis, terbuka, mandiri dan menerima apapun karakteristik warga sekolahnya. Seperti yang menejadi prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

REFERENSI

- Gistituati, N., Hadiyanto, Sopandi, A. A., & Kusumastuti, G. (2020). *Development of an Instrument to Measure the Inclusive Classroom Climate*. 464 (Psshers 2019), 193–196.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200824.045>
- Hadiyanto. (2016). *Teori dan Pengembangan Iklim Kelas dan Iklim Sekolah*. Kencana. <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/12920>
- Hadiyanto. (2019). *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Riset dan Implementasinya di Sekolah*. IRDH.
- Hadiyanto, H., Syahril, S., Arwildayanto, A., & Sumar, W. T. (2019). Development of University Classroom Climate Inventory. *ATLANTIS PRESS. Advances in Social Science, Educational and Humanities Research*, 295(ICETeP 2018), 346–350.
<https://doi.org/10.2991/icetep-18.2019.81>
- Kedir, K., & Geleta, A. (2017). Leading Educational Change: The Practices of Transformational Leadership in the Ethiopian Technical Vocational Education and Training (TVET) Institutions. *Online Submission*, 9 (5), 46–61.
<https://doi.org/10.5897/IJVTE2017.0233>
- Kristiawan, M., & Fitriani, Y. (2020). The Influence of Principal's Supervision and Participation of Committee on the Primary School 's Performance. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 91–98.
- Lenenburg, F. C. (2010). School Facilities Management. *National Forum of Education Administration & Supervision Journal*, 9(1–2), 14–19.
<https://doi.org/10.1108/EUM0000000002138>
- Lian, B., & Kristiawan, M. (2018). Giving Creativity Room to Students through the Friendly School's Program. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
- Mansur, N. (2013). Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, XIV(1), 24–42.
- Rakhmawati, E. (2019). Manajemen Ekstrakurikuler Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Meningkatkan Multiple Intelegensi. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, XI(2), 62–82.
- Silalaiy, K., Ratanaolarn, T., & Thaveesuk, M. (2018). The Sustainable Leadership for Vocational Schools in Thailand: A Structural Equation Model. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(3), 79–89.
<https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0050>
- Sutjipto, S., & Hadiyanto, H. (2002). Supervisi Berbasis Iklim Kelas: Penelitian Tindakan Kelas di SD YWK II Rawamangun Jakarta. *Forum Pendidikan*, 4(27).
- Usman, A. S. (2014). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 15(1), 13–31.
- Wilia, N., & Gistituati, N. (2018). The effect of leadership ethics and climate cooperation on job satisfaction of employees in education office of West Sumatera province. *ICESST Proceeding International Conference on Education, Social Sciences and Technology*, 1(14–15), 437–442.